



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI PINANG**

TRIWULAN III

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Triwulan merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja triwulan III yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala SKPD dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengukuran kinerja triwulan merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar pada triwulan berikutnya, sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

Sungai Pinang, 1 Oktober 2024
Camat Sungai Pinang,

Marwata, SE
NIP. 19690217 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. DASAR HUKUM.....	2
BAB II	4
PERENCANAAN KINERJA	4
A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	4
BAB III	15
AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
1. Capaian Sasaran Strategis	29
2. Capaian Sasaran Kinerja	29
3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat	36
4. Rekomendasi	37
5. Rencana Tindak Lanjut	37
BAB IV	38
PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen SKPD dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif perencanaan strategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pencapaian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024.
2. Memberi gambaran tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Pinang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024.
2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Sungai Pinang.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang dijabarkan pada Perjanjian Kinerja dan kemudian disusun dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab pada instansi pemerintah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan dan pada rencana aksi ditetapkan capaian kinerja pertriwulan untuk seluruh indikator kinerja. Penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, sasaran strategis dan indikator kinerja merupakan target yang akan dicapai oleh Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dijabarkan dari sasaran indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD Tahun 2024.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Kecamatan Sungai Pinang
Tahun 2024

N O	Sasaran Strategis/Sas aran Kinerja	Indikator Kinerja	Targe t Tahu nan	Target Triwula nan	Satuan	Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggu ng Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatny a Penyelengga raan Pemerintaha n di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	77	-	Nilai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.271.964 .048	Camat
2	Terselenggar anya urusan penyusunan program perencanaan , keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja Intern (IKKI) Kec.Sunga i Pinang	76	-	Indeks	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.271.964 .048	Sekretaris Kecamata n
3	Terlaksananya a Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaa n, Penganggar an dan Evaluasi SKPD	100		Persentase	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.039.500	Kasubbag Perenkeu
4	Terlaksananya nya Administراس i Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administراس i Keuangan Perangkat Daerah	100		Persentase	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.843.220 .92	Kasubbag Perenkeu
5	Terlaksananya nya Administراس i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub.Kegiata n Administراس Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100		Persentase	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.648.800	Kasubbag Perenkeu
6	Tersusunnya a Administراس i Perangkat Daerah	Persentase Administراس Kepegawaia n Yang Terpenuhi	100		Persentase	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.770.00 0	Kasubbag Umpeg
7	Tersusunnya a Administراس i Umum	Persentase Administراس i Umum Perangkat Daerah	100		Persentase	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.175.8 00	Kasubbag Umpeg

N O	Sasaran Strategis/Sas aran Kinerja	Indikator Kinerja	Targe t Tahu nan	Target Triwula nan	Satuan	Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggu ng Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perangkat Daerah							
8	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100		Persentase	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.070.00 0	Kasubbag Umpeg
9	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	Persentase	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.028.9 20	Kasubbag Umpeg
10	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100		Persentase	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.010.00 0	Kasubbag Umpeg
11	Terselenggaranya Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100		Persentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.503.400	Kasi Kessos
12	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100		Persentase	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	23.201.00 0	Kasi Kessos
13	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dikecamatan	100		Persentase	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.723.50 0	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

N O	Sasaran Strategis/Sas aran Kinerja	Indikator Kinerja	Targe t Tahu nan	Target Triwula nan	Satuan	Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggu ng Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 4	Tercapainya Fasilitas Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	100		Persentase	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.603.500	Kasi Trantib
1 5	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi	100		Persentase	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.773.000	Kasi Trantib
1 6	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100		Persentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	151.339.500	Kasi Pemerintahan
1 7	Tercapainya fasilitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100		Persentase	Fasilitas Rekomendasi, Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.397.700	Kasi Pemerintahan
1 8	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100		Persentase			JF Perencana Ahli Pertama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang memiliki 1 Sasaran Strategis yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan Indikator Kinerja adalah Nilai Evaluasi Kecamatan, terdiri dari 6 program 15 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk indikator sasaran yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan belum dilakukan penilaian oleh tim sehingga belum bisa ditampilkan pada laporan ini. Adapun untuk target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja TW III

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	-	Nilai	-	N/A	-	Camat
2	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	-	Indeks	-	N/A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris Kecamatan

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	25	Persentase	25	100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perenkeu
4	Perencanaan dan penganggran perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	0	Dok	0	N/A	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Perenkeu
5	Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	1	Laporan	1	100	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perenkeu
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	30	Persentase	30	100	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag Perenkeu
7	Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	30	Bulan	30	100	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Perenkeu

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Penatalaksanaan verifikasi keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Terverifikasinya dokumen keuangan dan tersusunnya dokumen laporan pelaksana kegiatan tepat waktu dan tepat mutu	3	Persentase	3	100	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kasubbag Perenkeu
9	Penyusunan Laporan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya laporan keuangan tahunan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	-	Dokumen	-	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kasubbag Perenkeu
10	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	25	Persentase	25	100	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kasubbag Perenkeu
11	Penatausahaan BMD perangkat Daerah yang berkualitas	Tersusunnya laporan penatausahaan BMD perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	1	Laporan	1	100	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kasubbag Perenkeu
12	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan dan tepat waktu	25	Persentase	25	100	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag Umpeg

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai sesuai kebutuhan dan tepat waktu	1	Laporan	1	100	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kasubbag Umpeg
14	ASN yang meningkat kompetensinya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	1	Orang	1	100	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kasubbag Umpeg
15	Terselenggaranya kegiatan kantor	PersentaseTerfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	20	Persentase	20	100	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umpeg
16	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	10	Paket	10	100	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasubbag Umpeg
17	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan	3	Paket	3	100	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kasubbag Umpeg
18	Kunjungan tamu yang terfasilitasi	Difasiliatasinya kegiatan kunjungan tamu	1	Laporan	1	100	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kasubbag Umpeg

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	Laporan	3	100	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
20	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	0	Persentase	0	N/A	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umpeg
21	Pengadaan peralatan mebelair sesuai dengan rencana kebutuhan	Tersedianya sarana dan prasarana Mebelair sesuai dengan kebutuhan	-	Unit	-	N/A	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kasubbag Umpeg
22	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan	1	Unit	1	100	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasubbag Umpeg
23	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	25	Persentase	25	100	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umpeg
24	Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	9	Bulan	9	100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasubbag Umpeg

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	20	Persentase	20	100	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umpeg
26	Terlaksananya pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	3	100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubbag Umpeg
27	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	2	Unit	2	100	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasubbag Umpeg
28	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Terpelihara dan berfungsi gedung kantor dengan baik	1	Gedung	1	100	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasubbag Umpeg
29	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Pelayanan bidang sosial kemasyarakatan	30	Persentase	30	100	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kasi Kessos

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana	Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	3	Kegiatan	3	100	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Kessos
31	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kagiatan Kesos Yang Dilaksanakan	50	Persentase	50	100	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Kessos
32	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Kegiatan	2	100	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kasi Kessos
33	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	Persentase	20	100	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kasi PM

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	Lembaga kemasyarakatan	0	N/A	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kasi PM
35	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Kegiatan	3	100	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi PM
36	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Diselenggarakan	40	Persentase	30	75	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib
37	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Yang Terlaksana	Jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	2	Laporan	2	100	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Trantib

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang Terlaksana	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	0	0	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kasi Trantib
39	Terlaksanan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Yang Dilaksanakan	0	Persentase	0	N/A	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kasi Trantib
40	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Terlaksana	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	Kegiatan	0	N/A	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kasi Trantib

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terlaksana	25	Persentase	25	100	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi PEM

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Terlaksana	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1	Kegiatan	1	1	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kasi PEM

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Yang Terlaksana	Jumlah Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	Kegiatan	1	100	Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kasi PEM
44	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40	Persentase	30	75	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi PEM
45	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	Kegiatan	0	N/A	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kasi PEM
46	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Yang Difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	Kegiatan	0	N/A	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kasi PEM

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Kegiatan	0	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kasi PEM
48	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi dalam rangka Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	Kegiatan	0	N/A	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kasi PEM
49	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga yang di Fasilitasi	2	Kegiatan	2	100	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kasi PEM

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Triwulan III	Satuan	Realisasi Triwulan	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Kegiatan	1	100	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kasi PEM

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Capaian Sasaran Strategis

Sasaran strategis pada Kecamatan Sungai Pinang yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan pada triwulan III ini tidak ada target kinerja, target kinerja ditetapkan pada triwulan IV sehingga pada triwulan III ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya.

B. Capaian Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja dengan target kinerja yang tercapai :

1. Sasaran kinerja terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian dengan indikator kinerja Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan pada triwulan III ini tidak ada target kinerja, target kinerja ditetapkan pada triwulan IV sehingga pada triwulan II ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya.
2. Sasaran kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu, target 25 % realisasi 25 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai).
3. Sasaran kinerja perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu, pada triwulan III ini tidak ada target kinerja, target kinerja ditetapkan pada triwulan IV sehingga pada triwulan III ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya.
4. Sasaran kinerja evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indicator tersusunnya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu, target 1 laporan realisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai).
5. Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu, target 30 % realisasi 30 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai).

6. Sasaran kinerja pelaksanaan pembayarran gaji dan tunjangan dengan indikator terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu, target 3 bulan realisasi 3 bulan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai).
7. Sasaran kinerja penatalaksanaan verifikasi keuangan perangkat daerah yang berkualitas dengan indicator terverifikasinya dokumen keuangan dan tersusunnya dokumen laporan pelaksana kegiatan tepat waktu dan tepat mutu, target 100 % realisasi 100 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai).
8. Sasaran kinerja penyusunan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator tersusunnya laporan keuangan tahunan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP, pada triwulan III ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan III ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya.
9. Sasaran kinerja pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indicator tersusunnya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu, target 25 % realisasi 25 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai).
10. Sasaran kinerja penatausahaan BMD perangkat Daerah yang berkualitas tersusunnya dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu, target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai).
11. Sasaran kinerja lancarnya administrasi kepegawaian daerah, dengan indikator terpenuhinya administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan dan tepat waktu, target 25 % realisasi 25 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
12. Sasaran kinerja terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, dengan indikator laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai sesuai kebutuhan dan tepat waktu, target 1 laporan realisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
13. Sasaran kinerja ASN yang meningkat kompetensinya, dengan indikator jumlah pegawai yang mengikuti diklat, target 1 orang realisasi 1 orang dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
14. Sasaran kinerja terselenggaranya kegiatan kantor, dengan indikator persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi

perkantoran, target 20 % realisasi 20 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);

15. Sasaran kinerja peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia, dengan indikator terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor, target 10 paket realisasi 10 paket dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
16. Sasaran kinerja barang cetakan dan penggandaan yang tersedia, dengan indikator penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan, target 3 paket realisasi 3 paket dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
17. Sasaran kinerja kunjungan tamu yang terfasilitasi, dengan indikator difasiliatasinya kegiatan kunjungan tamu, target 1 laporan realisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
18. Sasaran kinerja rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi, dengan indikator terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, target 3 laporan realisasi 3 laporan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
19. Sasaran kinerja tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, dengan indikator persentase pengadaan barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan, pada triwulan II ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan III ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya;
20. Sasaran kinerja Pengadaan peralatan mebelair sesuai dengan rencana kebutuhan, dengan indikator tersedianya sarana dan prasarana Mebelair sesuai dengan kebutuhan, pada triwulan III ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan III ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya;
21. Sasaran kinerja pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan, dengan indikator tersedianya sarana dan prasarana peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan, pada triwulan III ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan III ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya;
22. Sasaran kinerja tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan indikator persentase jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi, target 25 % realisasi 25 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);

23. Sasaran kinerja lancarnya Jasa pelayanan umum kantor, dengan indikator tersedianya jasa pelayanan umum kantor, target 3 bulan realisasi 3 bulan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
24. Sasaran kinerja terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, dengan indikator persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan, target 20 % realisasi 20 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
25. Sasaran kinerja terlaksananya pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan indikator kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, target 3 unit realisasi 3 unit dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
26. Sasaran kinerja terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan indikator peralatan dan mesin yang terpelihara, target 2 unit realisasi 2 unit dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
27. Sasaran kinerja terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, dengan indikator terpelihara dan berfungsinya gedung kantor dengan baik, target 1 gedung realisasi 1 gedung dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
28. Sasaran kinerja terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, dengan indikator presentase pelayanan bidang sosial kemasyarakatan, target 30 % realisasi 30 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
29. Sasaran kinerja penyelenggaraan pelimpahan kewenangan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan yang terlaksana, dengan indikator jumlah penyelenggaraan pelimpahan kewenangan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan, target 3 kegiatan realisasi 3 kegiatan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
30. Sasaran kinerja terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan indikator presentase koordinasi kegiatan kesos yang dilaksanakan, target 50 % realisasi 50 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
31. Sasaran kinerja terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, dengan indikator jumlah pelaksanaan

kewenangan lain yang dilimpahkan, 2 kegiatan realisasi 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);

32. Sasaran kinerja terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan, dengan indikator persentase koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, target 20 % realisasi 20 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
33. Sasaran kinerja terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dengan indikator jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, pada triwulan III ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan III ini tidak ada realisasi dan capaian kinerjanya;
34. Sasaran kinerja terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dengan indikator jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, target 2 kegiatan realisasi 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
35. Sasaran kinerja sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana, dengan indikator jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal, target 2 laporan realisasi 2 laporan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
36. Sasaran kinerja terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan indikator persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan, pada triwulan III ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan III ini tidak ada realisasi dan capaian kinerjanya;
37. Sasaran kinerja terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana, dengan indikator jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada triwulan III ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan III ini tidak ada realisasi dan capaian kinerjanya;

38. Sasaran kinerja terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan, dengan indikator persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana, target 25 % realisasi 25 % dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
39. Sasaran kinerja pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terlaksana, dengan indikator jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada triwulan III ini target 1 % realiasi 1 dan capaian kinerjanya 100%(target tercapai);;
40. Sasaran kinerja semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal yang terlaksana, dengan indikator jumlah kegiatan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal, target 1 kegiatan realisasi 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
41. Sasaran kinerja terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, dengan indikator jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa, pada triwulan III ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan II ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya;
42. Sasaran kinerja terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, dengan indikator jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam rangka pengelola dataan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, pada triwulan II ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan II ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya;
43. Sasaran kinerja terlaksananya fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, dengan indikator jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam rangka penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, pada triwulan

III ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan III ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya;

44. Sasaran kinerja terlaksananya fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga, dengan indikator jumlah kegiatan kerjasama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga yang di fasilitasi, target 2 kegiatan realisasi 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100 % (target tercapai);
45. Sasaran kinerja terlaksananya fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dengan indikator jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, pada triwulan III ini tidak ada target kinerja sehingga pada triwulan III ini tidak ada realiasi dan capaian kinerjanya.

Sasaran kinerja dengan target kinerja yang tidak tercapai :

1. Sasaran kinerja terlaksananya koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan, target 40 % realisasi 30 % dengan capaian kinerja 75 % (target tidak tercapai), yaitu pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Sasaran kinerja harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terlaksana, jumlah pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat, target 1 laporan realisasi tidak ada dengan capaian kinerja 0 % (target tidak tercapai) yaitu pada sub kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, aktifitas FKDM belum dilaksanakan;
3. Sasaran kinerja terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, target 40 % realisasi 30 % dengan capaian kinerja 75 % (target tidak tercapai), yaitu pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
4. Sasaran kinerja terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa, jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa, target 1 kegiatan realisasi 0 dengan capaian kinerja 0 % (target tidak tercapai); yaitu pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu aktifitas rakor BPD belum dilaksanakan disebabkan kasi Pemerintahan sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut melaksanakan jadwal diklat PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas) sehingga pelaksanaannya diundur pada triwulan III.

C. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor pendorong pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

- Adanya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk anggaran, regulasi, dan fasilitasi sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- Dukungan pimpinan sangat baik;
- Kerjasama dan koordinasi antar seksi berjalan baik;
- Kerjasama dan koordinasi antar pegawai yang terjalin baik;
- Akses jalan ke desa yang baik;
- Koordinasi antar seksi yang terjalin baik;
- Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintahan desa yang terjalin baik;
- Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terjalin baik.

Faktor penghambat :

1. Faktor penghambat pada sasaran kinerja terlaksananya koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - Adanya perubahan regulasi terkait Forkopimcam
2. Faktor penghambat pada sasaran kinerja terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa :
 - Terbentur beberapa jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas terkait

D. Rekomendasi

Dari hasil capaian kinerja triwulan III yang telah dilaksanakan, direkomendasikan sebagai berikut :

- Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum – sub kegiatan sub kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh

agama dan tokoh Masyarakat agar ditindaklanjuti oleh Kasi Trantib pada bulan Oktober 2024

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa agar ditindaklanjuti oleh Kasi Pemerintahan pada TW III.
- Kepada seluruh pegawai agar lebih memperhatikan dan mencermati target kinerjanya masing-masing sesuai dengan PK dan rencana aksi yang telah disusun.

E. Rencana Tindak Lanjut

1. Kegiatan yang telah ditetapkan pada rencana aksi dan tidak terlaksana pada TW III agar ditindaklanjuti pada TW IV;
2. Pelaksanaan kegiatan FKDM dilaksanakan pada Oktober 2024;
3. Pelaksanaan rakor BPD dilaksanakan pada triwulan III;

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan III target kinerja yang tercapai ada 45 sasaran kinerja, target kinerja yang tidak tercapai ada 4 sasaran kinerja;
2. Kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat kendala pada TW III agar menjadi perhatian dan evaluasi untuk mengantisipasi kendala pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada TW IV.
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian berkoordinasi dengan Kasubag. Program Keuangan dan Aset laksanakan penyusunan penilaian kinerja pegawai untuk penetapan reward dan punishment.

Camat Sungai Pinang,

Marwata, SE
NIP. 19690217 198903 1 003